

**ANALISIS HUBUNGAN CURAHAN WAKTU KERJA WANITA  
PADA SEKTOR FORMAL DENGAN KUALITAS KELUARGA DI  
KABUPATEN MAMASA**

**DEWI SIRINA  
P03 06 210 508**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TESIS**

**ANALISIS HUBUNGAN CURAHAN WAKTU KERJA WANITA  
PADA SEKTOR FORMAL DENGAN KUALITAS KELUARGA  
DI KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan diajukan oleh

**DEWI SIRINA**  
**Nomor Pokok P03 06 210 508**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 06 Mei 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat

  
**Dr. Paulus Uppun, MA**  
Ketua

  
**Dr. H. Madris, DPS., SE, M.Si**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin,

  
**Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc**

  
**Prof. Dr. Ir. Mursalim**



## PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatNya serta lindungan kesehatan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, namun atas izin dari Yang Maha Kuasa dan kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada Bapak Dr. Paulus Uppun, MA sebagai Penasehat atau pembimbing I dan Bapak Dr. Madris, DPS, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak dari awal hingga penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingannya, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak dan Ibu Penguji, Prof.Dr.M.Tahir Kasnawi, SU, Prof.Dr.Sulaiman Asang, MS, Prof. Dr. Maria E Pandu, MA, yang telah menguji dan telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam tesis ini.
2. Bapak Prof.Dr.Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Kepala bidang kepegawaian beserta staf pada Kantor sekretariat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mamasa yang telah banyak membantu penulis dalam penyediaan data dan dalam memberikan informasi hingga tesis ini dapat selesai.

4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nicolas Sirina dan Ibunda Salomina yang senantiasa memberi doa restu dan motivasi kepada penulis.
5. Kepada suami terkasih yang dengan sabar mendampingi dan bersama-sama dengan kami selama menjalani studi,serta kepada ananda tersayang Gladys Queena yang senantiasa menjadi spirit utama kami dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Perencanaan Kependudukan dan SDM pada Program Pascasarjana UNHAS yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka serta
7. Segenap keluarga dan teman-teman yang namanya tidak tercantum, penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya selama penulis menjalani studi hingga penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan kami terima demi kesempurnaan tesis ini.

Makassar, April 2013

DEWI SIRINA

## ABSTRAK

**DEWI SIRINA.** *Analisis Hubungan Curahan Waktu Kerja Wanita pada Sektor Formal Terhadap Kualitas Keluarga di Kabupaten Mamasa (dibimbing oleh Paulus Uppun dan Madris).*

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak dari curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dan hubungannya terhadap kualitas keluarga di Kabupaten Mamasa dengan indikator pendapatan wanita pekerja, pendidikan anak-anaknya, dan kesehatan anak-anak wanita pekerja tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner yang berhubungan dengan penelitian ini. Model analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan menjelaskan hubungan variabel penelitian dengan tabulasi silang dan *chi*-kuadrat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa curahan waktu kerja wanita pada sektor formal berpengaruh positif atau signifikan terhadap kualitas keluarga yang meliputi pendapatan, pendidikan anak, dan kesehatan anak-anaknya.

Kata kunci: curahan waktu kerja wanita, sektor formal



## ABSTRACT

**DEWI SIRINA.** *An Analysis on the Relationship Between the Women's Working Time Availability of Formal Sector and Family Quality in Mamasa Regency* (supervised by Paulus Uppun and Madris)

The aim of the research is to describe the impact of women's working time availability of formal sector and its relation to family quality in Mamasa Regency with the indicators of women's income, their children education, and their children's health.

The data consisted of primary data. The methods of obtaining the data were observation, interview, and questionnaire. The data were analyzed descriptive-qualitatively in order to explain the relationship between research variables and cross tabulation and chi square.

The results of the research indicate that women's working time availability of formal sector has a positive and significant influence on family quality involving their income, their children's education, and their children's health.

Key words : women's working time availability of formal sector



## DAFTAR ISI

PRAKATA

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	5
1.3.	Tujuan Penelitian	5
1.4.	Manfaat Penelitian	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.	Konsep Pemberdayaan Wanita	7
2.2.	Angkatan Kerja dan PNS Wanita	10
2.3.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Pekerja Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Fertilitas	13
2.4.	Definisi dan Konsep Kualitas Keluarga	24
2.5.	Kerangka Pikir	29
2.6.	Hipotesis	31

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.	Rancangan Penelitian	32
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian	34
3.4.	Variabel Penelitian Dan Desain Penelitian	35
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.	Analisa Data	37
3.7.	Definisi Operasional	38

**BAB IV GAMBARAN UMUM, KEADAAN DEMOGRAFI DAN  
KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK  
KABUPATEN MAMASA**

4.1.	Gambaran Umum	43
4.2.	Keadaan Demografi	44
4.2.1.	Keadaan Penduduk	45
4.3.	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	49
4.3.1.	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	49
4.3.2.	Sarana Kesehatan	51
4.3.3.	Kesempatan Kerja Dalam Kegiatan Ekonomi	54
4.3.4.	Tingkat Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga	56

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Karakteristik Sosial Demografi Responden (Pekerja Wanita Sektor Formal) di Kabupaten Mamasa	59
5.1.1. Umur Responden	59
5.1.2. Tingkat Pendidikan	62
5.1.3. Status Perkawinan	64
5.1.4. Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga	65
5.2. Partisipasi Wanita Dalam Bekerja Sektor Formal	67
5.2.1. Curahan Waktu	67
5.2.2. Lama Kerja	70
5.2.3. Besaran Pendapatan	72
5.3. Aspek Kualitas Keluarga	73
5.3.1. Pendapatan Keluarga	74
5.3.2. Pendidikan Anak	75
5.3.3. Kesehatan Keluarga	78
5.3.4. Program Keluarga Berencana	80
5.4. Analisis Hubungan Kegiatan Pekerja Wanita Sektor Formal Dengan Kualitas Keluarga	81
5.4.1. Hubungan Curahan Waktu dengan Kualitas Keluarga	81

5.4.1.1. Hubungan Curahan Waktu dengan Pendapatan Rumah Tangga	81
5.4.1.2. Hubungan Curahan Waktu dengan Pendidikan Anak	82
5.4.1.3. Hubungan Curahan Waktu dengan Kesehatan Anak	85

## **BAB VI PENUTUP**

6.1. Simpulan	87
6.2. Saran	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>
3.1. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Wanita di Kantor Sekertariat dan BPPKB Kab. Mamasa tahun 2012	35
4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rumah Tangga, Rata-rata Anggota Rumah Tangga, dan Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamasa Tahun 2010	46
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamasa Tahun 2010	47
4.3. Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Mamasa Tahun 2010	50
4.4. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mamasa tahun 2010	53
4.5. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kabupaten Mamasa Tahun 2010	55
4.6. Golongan Pengeluaran Perkapita Per Rumah Tangga Dalam Sebulan Di Kabupaten Mamasa 2010	58
5.1. Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Kelompok Umur	60
5.2. Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten mamasa Menurut Tingkat Pendidikan	63
5.3. Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Status Perkawinan	64
5.4. Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di kabupaten Mamasa Menurut Tanggungan Keluarga	66
5.5. Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa menurut Rata-rata Curahan Waktu Kerja	69
5.6. Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Lama Bekerja	71

5.7.	Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Besaran Pendapatan	72
5.8.	Distribusi Responden Menurut Rata-rata Pendapatan Keluarga Per Bulan	74
5.9.	Distribusi Anak Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Kelompok Umur Usia Sekolah	76
5.10.	Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Frekuensi dan Persentase Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Formal	77
5.11.	Frekuensi dan Persentase Perawatan Kesehatan Keluarga Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa (Kurun waktu enam bulan terakhir)	78
5.12.	Distribusi Pekerja Wanita Sektor Formal di Kabupaten Mamasa Menurut Rata-rata Wanita yang Mengikuti Program Keluarga Berencana	80
5.13.	Hubungan Curahan Waktu dengan Pendapatan Rumah Tangga	81
5.14.	Hubungan Curahan Waktu dengan Pendidikan Anak	83
5.15.	Hubungan Curahan Waktu dengan Kesehatan Anak	84
5.16.	Rekapitulasi Hubungan Antara Variabel yang Diamati	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>		<b>Hal</b>
1.	Skema kerangka pikir	31

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

### Hal

1. Crosstabs hubungan curahan waktu dengan pendapatan keluarga
2. Crosstabs hubungan curahan waktu dengan pendidikan anak
3. Crosstabs hubungan curahan waktu dengan kesehatan anak
4. Rekapitulasi hasil penelitian
5. Daftar pertanyaan kuisisioner (survey list)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi bukan lagi merupakan hal yang tabu. Kaum wanita atau perempuan telah diberi kesempatan yang sama dengan kaum pria meski dalam kenyataannya belum terjadi secara total. Diyakini bahwa penghapusan diskriminasi gender dan memberdayakan perempuan akan memiliki pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Perempuan yang sehat, berpendidikan, dan berdaya akan memiliki anak yang juga sehat, berpendidikan, dan percaya diri. Pengaruh perempuan dalam pembuatan keputusan di rumah tangga telah menunjukkan dampak positif terhadap gizi, kesehatan dan pendidikan anak.

Wanita merupakan bagian dari sumber daya manusia potensial yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan pria. Hal ini sebagaimana ditandaskan Kartasasmita (1996) bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan antara pria dan wanita serta menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan tidak ada satupun peraturan perundang – undangan didalam tatanan hukum negara Indonesia yang membedakan antara pria dan wanita dan walaupun ada, sifatnya adalah untuk melindungi hak kaum wanita.

Kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan harkat dan martabatnya, hal ini memberikan nilai yang berarti bagi pembangunan bangsa tanpa mengesampingkan atau mengecilkan nilai-nilai serta kodratnya sebagai perempuan.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas wanita perlu dilihat wanita sebagai sumber daya yang harus ditingkatkan kemampuannya dan dioptimalkan pemberdayaannya dan ditempatkan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam pembangunan.

Namun kenyataannya , wanita lebih cenderung dijadikan obyek dalam program pembangunan. Wanita belum dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat pembangunan. Hal ini disebabkan pemahaman tentang perempuan hanya sebatas pada peran domestik (privat) sehingga kurang dilibatkan dalam penentuan kebijakan. Di samping itu, berkembangnya budaya *patriarkhi* yang menempatkan peran laki-laki sebagai mahluk yang berkuasa dan dominan, semakin memberikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Untuk membangun kesadaran dan potensi wanita dalam rangka *pemberdayaan perempuan*, hanya dapat dilakukan melalui proses

pendidikan yang berorientasi pada pengenalan realitas diri secara subyektif dan obyektif (Trisakti dan Sugiarti, 2002:25)

Pada tahun 1970-an setelah PBB menetapkan dekade pertama pembangunan (*pemberdayaan*) perempuan, fokus utama adalah meningkatkan peran utama perempuan dalam pembangunan. Strategi yang berfokus pada kaum perempuan ini pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan itu sendiri, hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam masyarakat termasuk pembangunan (Surya, 2003:26).

Seiring perjalanan waktu dan pengaruh perubahan sosial ekonomi serta budaya yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para wanita secara aktif dan relatif mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan termasuk mengambil bagian dan meningkatkan perannya pada sektor-sektor formal. Besarnya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja pada sektor formal sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keinginan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi, kebutuhan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan kualitas keluarga, serta semakin meluasnya kesempatan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita (Alatas dan Trisilo, 1988: 45).

Demikian halnya di Kabupaten Mamasa, daerah yang baru berusia 11 tahun menjadi salah satu daerah otonom ini menunjukkan keseimbangan antara kaum lelaki dan wanita dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan adanya data bahwa dari 65.377 jiwa

penduduk yang bekerja pada tahun 2011, terdapat 36.779 laki-laki dan 28.598 perempuan. Atau dari jumlah total tenaga kerja yang ada di kabupaten Mamasa terdapat 56,26 persen tenaga kerja laki-laki dan 43,74 persen tenaga kerja perempuan. Angka ini menggambarkan perbedaan yang tidak terlalu jauh. (BPS. Mamasa Dalam Angka 2011).

Di Kabupaten Mamasa, keterlibatan wanita bekerja pada sektor Formal dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki wanita itu sendiri sehingga mereka pada akhirnya mengambil keputusan untuk bekerja. Keputusan yang diambil wanita tersebut erat hubungannya dengan upaya dalam meningkatkan derajat kualitas keluarga mereka.

Upaya wanita dalam peningkatan kualitas keluarganya diwujudkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah keterlibatan wanita dalam kegiatan bekerja pada sektor formal. Konsekuensinya, keterlibatan kaum wanita dalam bekerja pada sektor formal tentu akan membawa perubahan-perubahan pada tingkat kehidupan sebuah keluarga. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang memiliki hubungan dengan kualitas keluarga. Dimana setiap wanita pekerja secara otomatis akan mencurahkan sebagian waktunya untuk bekerja di tempat kerjanya sementara pada sisi lain, setiap perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga mempunyai tugas pokok untuk mengurus rumah tangganya. Inilah yang menjadi variabel utama penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan kualitas keluarga di Kabupaten Mamasa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian, dalam bentuk penelitian dengan pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan kehidupan ekonomi atau pendapatan keluarganya.
2. Bagaimana hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan pendidikan anak-anaknya.
3. Bagaimana hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan kesehatan anak-anaknya..

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan pendapatan atau kehidupan ekonomi rumah tangganya.
2. Untuk mengetahui hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan pendidikan anak-anaknya.
3. Untuk mengetahui hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan kesehatan anak-anaknya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai hubungan curahan waktu kerja wanita pada sektor formal dengan kualitas keluarga di Kabupaten Mamasa.
2. Sebagai bahan penunjang atau perbandingan bagi penelitian lanjutan, utamanya yang menyangkut masalah kependudukan dan kajian-kajian mengenai pemberdayaan Wanita pada masa mendatang.
3. Menjadi acuan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja wanita serta pemberdayaannya dalam rangka peningkatan kualitas keluarga di kabupaten Mamasa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Pemberdayaan Wanita**

Dasawarsa perempuan Internasional menjadi pemicu utama bagi kegiatan penelitian dan pembahasan mengenai perempuan dalam pembangunan. Gagasan tentang persamaan menjadi kriteria penting bagi pemikiran tentang apa yang dibutuhkan perempuan dari pembangunan. Menurut Caroline Moser, pendekatan kebijakan terhadap perempuan dan pembangunan (women and development) yang berkembang dari kepedulian terhadap persamaan ini —pendekatan persamaan— adalah pendekatan yang mengakui bahwa :

Perempuan merupakan partisipasi aktif dalam proses pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduktifnya memberikan kontribusi kritis, meski tidak diakui, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut dimulai dengan asumsi dasar bahwa strategi ekonomi seringkali berdampak negatif kepada perempuan, dan mengakui bahwa mereka harus “dibawa ke dalam” proses pembangunan melalui akses terhadap pekerjaan dan pasar...namun, pendekatan keadilan juga terkait dengan masalah mendasar tentang persamaan yang mentransendenkan bidang pembangunan...yang kepedulian utamanya adalah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup kehidupan publik maupun privat. Pendekatan ini mengidentifikasi asal-usul

subordinasi perempuan yang berada tidak hanya dalam konteks keluarga, melainkan pula dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di pasar .

Mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja bagi kaum wanita sangat menguntungkan secara ekonomis karena 4 alasan;

1. Tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan kaum wanita lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan Negara berkembang.
2. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya di lahan pertanian dan pabrik, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan dan gizi anak-anak.
3. Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang.
4. Karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di Negara berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai.

Dengan demikian, wanita yang memiliki pendidikan akan mempunyai kesempatan untuk bekerja di sector formal dan akan menghasilkan generasi yang lebih baik.

Wanita yang mempunyai pekerjaan tetap, tentunya akan mempunyai pendapatan yang tetap pula untuk menunjang kelangsungan hidup rumah tangganya dan akan mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik kesehatan dan gizi maupun pendidikan anak-anaknya. Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan rendah terpaksa hanya akan bekerja pada sektor informal. Mereka terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan tidak tetap yang berpendapatan rendah, tanpa adanya tunjangan-tunjangan kesejahteraan atau jaminan keselamatan kerja.

Jika dicermati gerakan perempuan Indonesia sesungguhnya telah berkembang sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Hanya saja bukan merupakan gerakan tuntutan feminisme atau tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) melainkan semata-mata perjuangan untuk memerdekakan bangsa dan membantu pemerintah dalam pembangunan (Soetjipto, 2000:69).

Dalam konferensi Internasional perempuan di Beijing tahun 1995, secara global disepakati peran sentral Hak Asasi Manusia (HAM) untuk perjuangan wanita kearah kesetaraan gender. Terdapat dua belas sasaran yang disepakati menjadi prioritas perlindungan sekaligus pemberdayaan perempuan, namun penelitian ini perhatian dititikberatkan hanya pada empat dari dua belas sasaran yang dimaksud :

1. Perempuan dan pendidikan/pelatihan
2. Perempuan dan kesehatan
3. Perempuan dan kekerasan/pelecehan
4. Ketimpangan ekonomi/kesenjangan pendapatan

Sebagai respon dari pencaangan tersebut diatas, perempuan Indonesia memasukkan kebijakan perempuan dalam GBHN tahun 1978 yang populer dengan *kebijakan peran ganda perempuan*. Kebijakan itu didasari asumsi bahwa selama ini kaum perempuan hanya berperan sebagai ibu dan istri yang kurang memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Padahal kaum perempuan juga merupakan bagian dari sumber daya manusia yang potensial dan esensial untuk dilibatkan serta dikembangkan. Oleh karena itu, kaum perempuan harus didorong untuk berpartisipasi aktif di sector public namun tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan kodratnya.

## **2.2. Angkatan Kerja dan PNS Wanita**

Istilah angkatan kerja yang sebenarnya tidaklah identik dengan tenaga kerja (*man power*). Angkatan kerja dibedakan atas; bekerja, menganggur dan mencari pekerjaan. Yang dimaksud dengan bekerja adalah melakukan aktivitas atau kegiatan dengan maksud memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam dalam sehari atau menurut Simanjuntak dalam Rabihatun (1996:34) paling sedikit 2 (dua) hari dalam seminggu. Menganggur artinya tidak bekerja atau belum mendapat pekerjaan tetap

yang terbagi atas pengangguran terbuka dan setengah menganggur, sedangkan pencari pekerjaan dimaksud adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang berusaha mendapatkan atau sedang mencari pekerjaan.

Menurut munir (1981 :54), bahwa kelompok tenaga kerja yang digolongkan bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari. Sedangkan yang digolongkan mencari pekerjaan adalah mereka yang bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mencari atau mendapatkan pekerjaan, mereka dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa (Munir, 1981:56).

Selanjutnya menurut mulyadi (2003: 57-58), angkatan kerja (*labour force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produktif dalam produksi barang dan jasa.

Dengan adanya pengertian tersebut diharapkan timbul kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan yang selanjutnya akan melahirkan partisipasi atau ikut serta mengambil bagian dalam hal pembangunan, termasuk tenaga kerja wanita yang berpartisipasi dalam

pembangunan khususnya sebagai tenaga kerja pada sektor formal. Dimana salah satu sektor formal yang menjadi tempat wanita berpartisipasi sebagai tenaga kerja yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang dimaksud adalah mereka yang :

- a. Bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND), sekretariat Lembaga Negara, Instansi vertikal Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, instansi TNI dan instansi kepolisian;
- b. Bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Diperbantukan atau dipekerjakan daerah otonom dan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya;
- d. Menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan lain sebagainya;
- e. Gajinya dibebankan pada APBN atau APBD.

Selain sebagai PNS, sektor formal lain yang banyak menyerap tenaga kerja wanita di Kabupaten Mamasa adalah sebagai tenaga kontrak daerah, dimana para tenaga kerja ini bekerja pada kantor-kantor instansi pemerintah, namun belum mendapatkan upah atau gaji yang sama dengan PNS dan waktu atau jam kerjanya pun masih cenderung lebih rendah daripada PNS.

### **2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Pekerja Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Fertilitas**

## 1. Faktor pendapatan

Dalam analisis ekonomi fertilitas dibahas mengapa permintaan anak berkurang bila pendapatan meningkat. *New household economics* berpendapat bahwa (a) orang tua mulai lebih menyukai anak-anak yang berkualitas lebih tinggi dalam jumlah yang hanya sedikit sehingga “harga beli” meningkat; (b) bila pendapatan dan pendidikan meningkat maka semakin banyak waktu (khususnya ibu) yang digunakan untuk merawat anak. Jadi anak menjadi lebih mahal.

*Libenstein* berpendapat bahwa anak dilihat dari 2 segi kegunaannya (utility) dan biaya (cost). Kegunaannya adalah memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua dimasa depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut.

Apabila ada kenaikan pendapatan, aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biayanya naik. Sedangkan kegunaannya turun sebab walaupun anak masih memberikan kepuasan tetapi balas jasa ekonominya turun. Di samping itu orang tua juga tak tergantung dari sumbangan anak. Jadi biaya membesarkan anak lebih besar dari kegunaannya. Hal ini mengakibatkan *demand* terhadap anak menurun atau dengan kata lain fertilitas turun (Mundiharno ; 1997).

Selain itu, Easterlin berpendapat bahwa bagi Negara-negara berpendapatan rendah permintaan mungkin bisa sangat tinggi tetapi suplainya rendah, karena terdapat pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan suatu permintaan “berlebihan” (*excess demand*) dan juga menimbulkan sejumlah besar orang yang benar-benar tidak menjalankan praktek-praktek pembatasan keluarga. Di pihak lain, pada tingkat pendapatan yang tinggi, permintaan adalah rendah sedangkan kemampuan suplainya tinggi, maka akan menimbulkan suplai “berlebihan” (*over supply*) dan meluasnya praktek keluarga berencana (Mundiharno; 1997).

## **2. Faktor Biaya**

Faktor yang menentukan jumlah kelahiran anak yang diinginkan perkeluarga diantaranya adalah berapa banyak kelahiran yang dapat dipertahankan (*survive*). Tekanan yang utama adalah cara bertingkah laku itu sesuai dengan yang dikehendaki apabila orang melaksanakan perhitungan-perhitungan kasar mengenai jumlah kelahiran anak yang diinginkannya. Perhitungan-perhitungan yang demikian itu tergantung pada keseimbangan antara kepuasan atau kegunaan (*utility*) yang diperoleh dari biaya tambahan kelahiran seorang anak, baik berupa keuangan maupun psikis (Caldwell, 1983).

Menurut Robinson (1983) ada 3 macam tipe kegunaan anak yakni, kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai sumber hiburan, kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai suatu sarana produksi,

yakni dalam beberapa hal tertentu anak diharapkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang menambah pendapatan keluarga, kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai sumber ketentraman, baik pada hari tua maupun sebaliknya. Keadaan di Negara berkembang, anak dianggap sebagai barang investasi atau aktiva ekonomi. Orangtua berharap kelak menerima manfaat ekonomi dari anak. Manfaat ini akan nampak jika anak bekerja tanpa upah sawah atau usaha milik keluarga atau memberikan sebagian penghasilan kepada orang tua ataupun membantu keuangan orang tua (Ilicas dkk, 1990).

### **3. Faktor Usia Kawin Pertama**

Pengaruh usia kawin pertama orang tua terhadap fertilitas di Indonesia sejalan dengan pemikiran bahwa makin muda seseorang melakukan perkawinan maka makin panjang masa reproduksinya. Maka dapat diharapkan makin muda seseorang untuk melangsungkan perkawinan maka makin banyak pula anak yang akan dilahirkan, jadi hubungan antara panjang perkawinan dan fertilitas negative. Dalam masyarakat sering yang menikah memperoleh status baru, dimana status ini merupakan status social yang dianggap paling penting. Usia pernikahan yang dimaksud disini adalah umur pada waktu memasuki ikatan social, atau istilah perkawinan, usia konsumsi perkawinan (hubungan yang pertamakali dilakukan setelah menikah). Seperti yang diketahui bahwa pada saat seseorang menikah pada usia relative lebih

muda, maka masa subur atau reproduksinya akan lebih panjang dalam ikatan perkawinan sehingga mempengaruhi peningkatan fertilitas.

#### **4. Faktor Jam Kerja**

Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada unit sumber daya, perubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada. Menurut kamus besar bahasa Indonesia jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas kerja.

Dari segi undang-undang perburuan, jam kerja adalah jam/waktu yang dilakukan di bawah pengawasan pimpinan dari pihak kantor. Banyaknya jumlah jam kerja tergantung dari pihak kantor yang mempekerjakan para karyawan tersebut. Pada dasarnya jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam seminggu, 8 (delapan) jam sehari (tidak termasuk jam istirahat). Tentang jam kerja berdagang, usaha perfilman, usaha kesehatan, kebersihan, penerima tamu/receptionist, atau usaha sampingan adalah 44 (empat puluh empat) jam dalam seminggu.

Ketentuan Jam Kerja :

Menurut (Wulandari, 2004) jam kerja meliputi lamanya seseorang mampu bekerja sehari secara baik pada umumnya 6 sampai 8 jam, sisanya 16 sampai 18 jam digunakan untuk keluarga,

masyarakat, untuk istirahat dan lain-lain. Jadi satu minggu seseorang bisa bekerja dengan baik selama 40 sampai 50 jam. Selibhnya bila dipaksa untuk bekerja biasanya tidak efisien. Akhirnya produktifitas akan menurun, serta cenderung timbul kelelahan dan keselamatan kerja masing-masing akan menunjang kemajuan dan mendorong elancaran usaha baik individu ataupun kelompok. Pekerja diperbolehkan untuk istirahat sebanyak 1 sampai 1,5 jam setiap hari kerja dalam 8 jam, pekerja memerlukan istirahat agar dapat mempertahankan tingkat kerjanya dari hari kehari.

Oleh karena itu jam kerja biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai produktivitas jam kerja seseorang maka akan semakin besar produktivitasnya dan semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka akan semakin kecil pula peluang untuk memperoleh anak.

## **5. Faktor Pendidikan**

New household economics berpendapat bahwa bila pendapatan dan pendidikan meningkat maka semakin banyak waktu (khususnya waktu ibu) yang digunakan untuk merawat anak. Jadi anak menjadi lebih mahal. Sehingga hal ini dapat mengurangi kelahiran (Mundiharno ; 1997).

Sedangkan menurut Bouge (Lucas ; 1990) mengemukakan bahwa pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap fertilitas dari pada variable lain. Seseorang dengan tingkat pendidikan

yang relative tinggi tentu saja dapat mempertimbangkan berapa keuntungan financial yang diperoleh seorang anak dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkannya.

Serupa dengan teori tradisional perilaku konsumen, penerapan teori fertilitas di Negara-negara berkembang memberikan pemahaman bahwa seandainya harga relative atau biaya anak-anak meningkat akibat dari, misalnya, meningkatnya kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan, atau adanya undang-undang mengenai batas usia minimum bagi anak-anak yang hendak bekerja, maka keluarga-keluarga akan menginginkan sedikit anak-anak "tambahan".

Para orang tua akan tergerak untuk mementingkan kualitas daripada kuantitas anak, atau memberi kesempatan kepada istri dan ibu untuk bekerja menunjang pemeliharaan anak. Dengan demikian, salah satu cara untuk mendorong para keluarga agar menginginkan sedikit anak adalah dengan memperbesar kesempatan dibidang pendidikan dan membuka lapangan-lapangan pekerjaan berpenghasilan tinggi kepada kaum wanita.

Penelitian mengenai kaitan pendidikan dengan wanita dengan kesuburan di beberapa Negara, sudah maupun kurang berkembang, mengungkapkan bahwa adanya kaitan yang erat antara tingkat pendidikan dengan fertilitas dalam hal ini pada tingkat kesuburan. Semakin tinggi pendidikan semakin rendah kesuburan yang

mengakibatkan penurunan fertilitas. Di beberapa Negara, meluasnya kependaian baca tulis mengurangi anaknya kira-kira 1,5 tau kira-kira sepertiga.

Ada beberapa penjelasan yang diketengahkan mengenai peran pendidikan dalam menurunkan besar keluarga. Pendidikan dapat mempengaruhi pandangan hidup dan tata nilai orang sedemikian rupa sehingga ia tidak begitu saja lagi menerima tata cara bertingkah laku tradisional orang tuanya atau tokoh orang tua yang lain. Orang berpendidikan atau pandai baca – tulis lebih terbuka pada pikiran-pikiran baru dan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk bertemu muka dengan “penyalur perubahan” seperti para perencana bidang kesehatan atau penasehat program keluarga berencana. Pendidikan yang makan waktu lama kemungkinan besar akan menyebabkan perkawinan tertunda dan membuka jalan pilihan antara bekerja dan membesarkan anak. Pendidikan yang lebih tinggi mungkin pula berarti kehidupan ekonomi yang lebih terjamin, dan ini biasanya berarti keluarga yang lebih kecil.

Penjelasan ini menolong kita memahami mengapa ada kaitan erat antara pendidikan wanita dan besar keluarga (Brown; 1986).

Dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah (terutama pada daerah pertanian pesisir), anak-anak dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan sumber pendapatan yang penting bagi keluarga. Selain itu, anak dinilai sebagai investasi hari tua atau sebagai

komoditas ekonomi yang dapat disimpan dikemudian hari. Hal tersebut merupakan hubungan positif antara penghasilan dengan nilai anak. Berkorelasi negative apabila penghasilan yang tinggi akan menilai anak bukan sebagai potensi, modal atau rezeki. Mereka menilai anak sebagai beban dalam keluarga. Sehingga semakin tinggi penghasilan maka persepsi nilai anak akan berkurang sehingga fertilitas akan menurun.

## **6. Faktor Lokasi Pekerjaan**

Peran wanita dapat dilihat dari tiga perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga dan partisipan pembangunan atau pekerja pencari nafkah Hubeis (Achmad ; 1994)

- 1) Peran tradisi, sering juga disebut peran domestic menjadi urusan wanita. Semua pekerjaan rumah dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, merawat/mengasuh anak dan masih banyak lainnya berkaitan dengan rumah tangga. Wanita sebaiknya dirumah saja agar semua urusan terselesaikan dengan baik.
- 2) Peran transisi, yang terjadi khususnya didaerah pertanian, wanita sudah terbiasa bekerja dilahan pertanian keluarga, bila dikota bekerja diusaha keluarga.
- 3) Peran kontemporer, jika seorang wanita hanya memiliki peran diluar rumah tangga saat ini disebut wanita kontemporer atau wanita karir. Biasanya mereka memilih hidup tidak menikah dan mencari nafkah sendiri. Ini terdapat di kota-kota besar. Decade

perserikatan bangsa-bangsa untuk wanita (1976-1985) telah berperan penting dalam mengangkat dan menyebarkan pentingnya peran wanita dalam pembangunan social ekonomi di Negara dan masyarakat. Suatu kerangka konseptual mengenai peran wanita dan perubahan demografi, termasuk fertilitas dan pengaturannya, oleh (Oppong ; 1983) membagi peran-peran wanita ke dalam tujuh kategori, yaitu : peran sebagai ibu (maternal), pasangan kawin (conjugal), domestic, pekerjaan (occupational), kerabat, masyarakat dan peran individu. Teori ekonomi mengenai fertilitas (fertilitas) juga mengasumsikan bahwa waktu pemeliharaan anak sebagian besar disediakan oleh ibu. Diasumsikan bahwa ada pilihan utama bagi wanita antara kegiatan ekonomi/pekerjaan dan kegiatan sebagai orang tua. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mueller (Oppong; 1983), perhatian yang sedikit terutama ditujukan pada kemungkinan bahwa waktu untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan waktu luang jadi berkurang dengan adanya waktu untuk memelihara anak, demikian juga sebaliknya. Menurut (Koentjaraningrat ; 1982) salah satu variable yang berpengaruh dalam fertilitas adalah partisipasi angkatan kerja wanita, dengan asumsi bahwa semakin tinggi partisipasi angkatan kerja wanita, maka semakin rendah pula fertilitasnya.

Dalam hubungan ini (Bakir ; 1984) mengemukakan ada berbagai pendapat mengenai sifat hubungan antara fertilitas dan angkatan kerja, yaitu :

- 1) Partisipasi wanita dalam angkatan kerja mempunyai pengaruh negative terhadap fertilitas. Hal ini disebabkan karena terjadi pertentangan atau konflik antara fungsi dan tugas wanita sebagai pekerja. Oleh karena itu orang beranggapan bahwa meningkatnya kesempatan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di luar rumah dapat digunakan sebagai salah satu kebijaksanaan di bidang kependudukan yang mendukung program KB untuk menurunkan fertilitas.
- 2) Hubungan antar fertilitas dan angkatan kerja wanita sebagai hubungan kausal yang bersifat timbal balik, di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Berbagai penelitian di Negara maju menunjukkan bahwa hubungan antara fertilitas dan angkatan kerja wanita bersifat negative. Ini berarti wanita yang bekerja cenderung mempunyai anak yang lebih sedikit dan lebih aktif menggunakan kontrasepsi jika dibandingkan wanita yang tidak bekerja. Sebaliknya, di Negara-negara berkembang hubungan negative ini hanya ditemukan pada pekerjaan disektor informal di daerah perkotaan maupun di perdesaan marginal, fertilitas wanita yang tidak bekerja tiak berbeda dengan mereka yang bekerja. Bahkan di beberapa Negara berkembang wanita yang bekerja disektor

pertanian di daerah pedesaan ternyata mempunyai anak lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja.

Menurut Goldscheider (Ibrahim;1977) terdapat hubungan yang positif antara pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan dengan fertilitas. Hal ini diamati dari dua kecenderungan yang saling berbeda yaitu; kenaikan fertilitas suatu kelompok karena berstatus lebih tinggi dan perubahan keinginan kelompok tersebut untuk memiliki keluarga lebih besar; dan penurunan fertilitas dari kelompok berstatus lebih rendah karena mereka semakin ekspansif dan sukses dalam menggunakan alat kontrasepsi. Pendapat (Goldcheider;1971) berbeda hasil penelitian berikut. Hatmaji;1971 mengungkapkan bahwa terjadi hubungan negative antara pekerjaan wanita dengan fertilitas. Wanita yang bekerja diluar rumah cenderung mempunyai anak lebih banyak. Selain pekerjaan, pendidikan juga mempunyai pengaruh kuat terhadap fertilitas. Dapat dikatakan bahwa kenaikan tingkat pendidikan akan menghasilkan tingkat kelahiran yang rendah kerana pendidikan akan mempengaruhi persepsi negative terhadap nilai anak dan akan menekan adanya keluarga besar.

#### **2.4. Definisi dan Konsep Kualitas Keluarga**

Pada dasarnya, sebuah keluarga terdiri atas laki-laki (suami) dan perempuan (istri) ditambah dengan anak-anak mereka, biasa tinggal dalam satu rumah dan disebut sebagai keluarga inti.

Selanjutnya dikatakan suatu keluarga inti dapat menjadi keluarga luas (*extended family*) dengan adanya tambahan dari sejumlah orang baik yang sekerabat maupun tidak, yang secara bersama hidup dalam suatu rumah tangga dengan keluarga inti. Orang-orang sekerabat itu bisa berasal dari pihak suami maupun pihak istri. Sedangkan orang lain atau orang luar dapat mewujudkan keluarga luas dari suatu keluarga inti biasanya adalah pembantu rumah tangga atau buruh-buruh dan pesuruh-pesuruh yang hidup bersama dengan keluarga inti yang menjadi majikannya.

Dalam perkembangan sejarah masyarakat kelana (*nomadic society*) dari peradaban masyarakat pertanian yang hidup menetap, menuju masyarakat kerajinan sampai dengan masyarakat industry dilihat perubahan kelembagaan keluarga kecil atau inti. Jadi perkembangan sejarah secara obyektif akan sendirinya mengubah kelembagaan kekeluargaan atau suku menjadi keluarga inti (Hadi, 1994). Perkembangan yang demikian oleh Durkheim dalam Polak (1994) disebutkan “ Hukum Kontraksi Keluarga” atau dikenal dengan hukum mengerutnya keluarga.

Perkembangan keluarga yang demikian itu berkangsung secara evolusi dan memakan waktu panjang. Program Keluarga Berencana (KB) tidak mau mentera kepada pertumbuhan alam (*natural growth*) melainkan hendak mencapai pertumbuhan yang dipengaruhi atau diarahkan (*induced growth*) sebagai bagian terpadu dari pembangunan (Hariyadi, 1995)

karena itu, pemerintah melalui program keluarga berencana mengarahkan masyarakat Indonesia untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, sejahtera dan berkualitas.

Sejalan dengan pendapat diatas, Hurlock (1978) dalam Soekanto (1990:48) membagi keluarga berdasarkan jumlah anak yang dimiliki : (1) keluarga satu anak (*one child families*), adalah keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua dan satu orang anak; (2) keluarga kecil (*small families*), adalah keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua dengan dua sampai tiga orang anak; (3) keluarga sedang (*medium sized families*), adalah suatu bentuk keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua dengan empat sampai lima orang anak; (4) keluarga besar (*large families*), adalah bentuk keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua dengan jumlah anak yang lebih dari enam orang.

Sebagai unit terkecil dalam komunitas social, keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai spiritual dan norma-norma adab kesusilaan bagi anggotanya. Artinya, kualitas sumber daya manusia ditentukan kualitas keluarga.sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan keluarga Sejahtera, bahwa penyelenggaraan kualitas keluarga ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga menjalankan fungsi keluarga secara maksimal.

Fungsi keluarga yang dimaksud adalah : (a) fungsi keagamaan, dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar

kehidupan keluarga sebagai wahana pesemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insane yang religious dan penug taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak serta hubungan kekerabatan antara generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin, (c) fungsi perlindungan, diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa keluarga adalah wahana utama yang memeberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, (d) fungsi sosialisasi dan pendidikan, untuk mempersiapkan generasi baru yang lebih baik, maju dan berpengetahuan, (e) fungsi ekonomi, untuk mengembangkan kemampuan ekonomi anggotanya agar dapat mandiri.

Dengan demikian, kualitas keluarga merupakan perwujudan terpenuhinya seluruh fungsi-fungsi keluarga tersebut. Dimana peran wanita sebagai pelaksana aktifitas rumah tangga dan juga pelaku dalam aktifitas ekonomi harus mampu melaksanakan dan menyiasiatinya melalui upaya - upaya pengembangan dan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya dan mental spiritual sehingga dalam keluarga tersebut mampu melahirkan manusia yang berkualitas.

Keluarga kecil yang berkualitas tentu mencerminkan keluarga sejahtera, sebagaimana dikatakan Tjokrowinoto (1982), pengaruh keluarga kecil terhadap kehidupan keluarga bahwa asumsi dasar konsep keluarga kecil

sejahtera adalah keseimbangan yang lebih akan tercapai antara sumber mata pencaharian dengan jumlah anggota keluarga, sehingga tingkat konsumsi akan diperbaiki. Dengan kata lain, kesejahteraan keluarga kecil dapat dipertahankan sedangkan tingkat pendapatan yang sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat dapat ditingkatkan atau setidaknya konstan.

Konsep tingkat kesejahteraan (kemiskinan) selalu didasarkan perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan batas antara keadaan miskin (tidak sejahtera) dengan tidak miskin (sejahtera) atau sering disebut garis kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Konsep tingkat kesejahteraan (kemiskinan) selalu didasarkan pada kebutuhan hidup minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti.

Secara konseptual kesejahteraan keluarga berdasarkan tahapan-tahapan kesejahteraan sebagaimana standar yang ditetapkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (UU Nomor 10 Tahun 1992).

Tahapan keluarga sesuai dengan tingkat kesejahteraannya adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, papan, sandang, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar psikologis, seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya, social psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang rutin kepada masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.
5. Keluarga Sejahtera III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, social psikologis, dan oengembangan serta dapat memeberikan sumbangan yang rutin dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dengan demikian, *kualitas keluarga* yang dimaksud adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memiliki kebutuhan dasarnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dalam keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

## **2.5. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian, digali berdasarkan kajian teori yang selanjutnya dapat diperoleh gambaran jelas tentang keterlibatan wanita pekerja disektor formal.

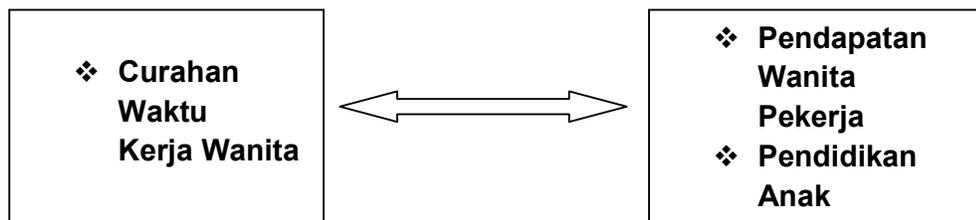
Di kabupaten Mamasa, kecenderungan keterlibatan penduduk wanita dalam kegiatan bekerja pada sektor formal terus mengalami peningkatan. Hal Ini tentu mempunyai hal ekonomis dan sosial yang relatif berbeda dan secara tidak langsung memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas keluarga dan perkembangan *sosio-economi kultural* dalam lingkungan masyarakat kabupaten Mamasa. Secara teoritis maupun anggapan umum selama ini, bahwa laki-laki sebagai kaum yang lebih banyak berperan dan dominan khususnya dalam lingkup tenaga kerja sektor formal ternyata mulai terbantahkan melalui statistik

perkembangan kemajuan partisipasi tenaga kerja wanita sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Secara garis besar, hubungan kegiatan pekerja wanita sektor formal dengan kualitas keluarga pada hakekatnya didasari oleh latar belakang yang dimiliki wanita yang meliputi antara lain : umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga, dan struktur keluarganya. Selanjutnya dengan latar belakang tersebut, maka curahan waktu yang diluangkan oleh wanita untuk bekerja pada sektor formal di kabupaten Mamasa dapat dilihat hubungannya dengan kualitas keluarga mereka yang meliputi: (1) kehidupan ekonomi /pendapatan; (2) pendidikan anak; dan(3) kesehatan anak.

Artinya, bahwa melalui penelitian ini dapat diketahui apakah curahan waktu kerja wanita bekerja pada sektor formal berhubungan dengan kualitas keluarga yang meliputi unsur-unsur tersebut di atas atautkah tidak.

Dari paparan tersebut, secara ringkas dapat digambarkan dengan sajian skema kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar. 1 : Skema kerangka pikir

## 2.6. Hipotesis

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Bahwa diduga:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara curahan waktu yang diluangkan wanita untuk bekerja pada sektor formal dengan pendapatan keluarganya.
2. terdapat hubungan yang signifikan antara curahan waktu yang diluangkan wanita untuk bekerja pada sektor formal dengan pendidikan anak-anaknya.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara curahan waktu yang diluangkan wanita untuk bekerja pada sektor formal dengan kesehatan anak-anaknya.